

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pasca runtuhnya Era Orde Baru 1998 sebagai tanda dimulainya Era Reformasi, perkembangan politik Indonesia tidak pernah terlepas dari isu sektarian baik yang berbaju etnis (suku), agama, ras, maupun ideologi. Terkhusus agama, berakhirnya rezim represif Orde Baru menjadi musim semi bagi kebangkitan agama-agama yang sebelumnya mendapat tekanan dari penguasa. Tekanan yang dialami pada masa Orde Baru menjadi bom waktu yang kemudian meledak saat dimulainya reformasi. Hal ini didukung pula dengan besarnya peluang yang diberikan bagi ekspresi diri dan kelompok di ruang publik. Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan media massa.

Fenomena politik identitas berbaju agama di Indonesia dalam ruang publik paling nyata terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tahun 2017 yang dianggap telah menodai dan menghina agama Islam melalui pidatonya. Ahok mengutip ayat Al-Quran, khususnya surat al Maida ayat 51. Pidatonya tersebut membangkitkan aksi bela Islam baik yang dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan agama Islam atau elit politik tertentu yang memiliki kepentingan terselubung di baliknya. Sekalipun yang menjadi dasarnya adalah potongan klip video yang diunggah secara sentimen di media sosial, tetapi berhasil menyulut emosi orang-orang yang memproklamirkan diri sebagai pembela agama Islam.

Penolakan tersebut selain sebagai bentuk aksi bela Islam, tetapi juga memuat motivasi terselubung yaitu karena Ahok dianggap sebagai representasi kelompok minoritas baik dari segi etnis (Tionghoa) maupun agamanya (Kristen), yang merupakan 'representasi kelompok lain'. Hal ini sekaligus menjadi tanda pernyataan 'ke-kami-an' dan pada saat yang sama menempatkan seseorang atau kelompok lain sebagai 'mereka'. Proses pengidentifikasian diri sebagai bagian

dari sebuah kelompok sosial pada saat yang sama melakukan disidentifikasi terhadap kelompok lain.

Indonesia kini berada di abad ke-21 yang mengalami pelbagai bentuk perubahan. Perubahan-perubahan tersebut menuntut penyesuaian yang tidak bisa dihindari. Bersamaan dengan itu ada kecenderungan untuk merelativisir nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan bersama. Pluralitas agama kini menjadi tantangan yang serius bagi Indonesia sebagai negara modern yang menganut sistem demokrasi.

Kebangkitan politik identitas menyebabkan munculnya relativisme agama dan imperialisme agama. Relativisme agama diartikan sebagai bentuk penerimaan terhadap perbedaan agama secara pasif. Dengannya semua agama dinilai sama, tidak ada pengakuan akan keautentikan masing-masing agama. Sedangkan imperialisme agama diartikan sebagai kecenderungan dari sebuah kelompok agama untuk menyebarkan agamanya dengan cara-cara yang represif bahkan anarkis. Hal ini berarti sebuah agama dinilai sebagai yang paling benar, dengan demikian menolak kehadiran agama-agama lain. Keberadaan agama lain ditolak dan dinilai sebagai penghalang berlakunya hukum Tuhan yang mereka anut. Ada sikap superioritas dalam diri sebuah agama, yang pada umumnya berasal dari agama mayoritas.

Kenyataan akan adanya eksklusivisme keagamaan, yang muncul dalam bentuk radikalisme menggambarkan tentang lemahnya penggunaan akal budi dalam kehidupan keagamaan. Pengamalan nilai-nilai agama terlampaui mengedepankan aspek emosional. Agama seolah-olah hanya sebatas pada tuntutan emosional semata. Ada krisis kontrol akal budi dan nalar publik dalam iman dan agama. Penggunaan akal budi dalam pemahaman akan teks-teks suci dan tradisi dinilai sebagai bentuk penodaan. Dengan demikian letak persoalannya terdapat pada cara menafsir teks-teks tersebut. Teks tidak pernah salah sejauh penafsiran atasnya tidak bermasalah.

Tuntutan penggunaan akal budi dalam iman dan agama tidak berarti bahwa menolak perasaan yang ada dalam warga beragama. Perasaan keagamaan

pun memiliki daya transformasi sosial, hanya bahwa perasaan itu perlu dibarengi dengan penggunaan rasio dan logika atasnya. Penggunaan rasio dan logika tersebut bertujuan untuk mengontrol perasaan-perasaan keagamaan tersebut, sekaligus sebagai bentuk verifikasi apakah perasaan itu sesuai dengan realitas dan objektif atau hanya khayalan tak berdasar atau mungkin sesat. Dalam konteks ini Indonesia dapat digolongkan sebagai negara sekular.

Sekularisme tidak bisa dipahami hanya sebatas pada dominasi rasio atau akal budi dalam kehidupan bersama, tetapi tetap harus dipahami dalam konteks sebuah negara yang dipengaruhi oleh situasi politik, kebudayaan dan sejarahnya. Untuk itulah ada *multiple secularisme*. Hal ini berarti terdapat perbedaan sekularisme di berbagai negara, termasuk antara Indonesia dan negara-negara lainnya. Apabila dalam konteks beberapa negara sekularisme berarti dominasi penggunaan akal budi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka dalam konteks Indonesia, sekularisme dapat dikatakan berarti dominasi penggunaan alasan-alasan keagamaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk Indonesia sendiri, persoalan yang marak terjadi bukan terletak pada dominasi rasio atas iman melainkan sebaliknya, dominasi sentimentalisme keagamaan atas akal budi. Realitas ini nyata dalam tindakan politik identitas.

Indonesia memang bukanlah negara sekular dalam artian yang penuh, karena negara masih mengakui andil agama dalam penyelenggaraan publik. Tetapi sekularisme sebagai sebuah doktrin kenegaraan ditemukan di Indonesia. Sebagai doktrin kenegaraan, sekularisme nampak dalam prinsip pemisahan antara otoritas agama dan otoritas politik, entah yang bertujuan untuk menjaga netralitas negara atau demi melindungi kebebasan hati nurani setiap warga negara atau yang bertujuan memfasilitasi kesetaraan warga negara untuk memiliki akses dalam partisipasinya di negara yang demokratis.

Ada dua model sekularisme yaitu sekularisme keras dan sekularisme lunak. Sekularisme keras dapat ditemukan di Prancis dengan *laicite*-nya dan di Turki dengan *laiklik*-nya, yang memprivatisasi urusan agama. Ruang publik harus bebas dari pandangan dan atribut keagamaan. Sedangkan sekularisme lunak tidak

mendomestikasi agama ke ruang privat melainkan mengakui peran agama di ruang publik. Indonesia digolongkan sebagai sekularisme lunak. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasarinya. *Pertama*, adanya netralitas negara dari doktrin-doktrin agama. Ada garis demarkasi yang jelas antara negara yang mengurus urusan *moral problem of justice* dan agama yang mengurus *ethical problem of the good*. Hal ini berarti negara tidak ikut mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan kehidupan keimanan, negara hanya mengurus moralitas publik, sedangkan moralitas privat menjadi urusan masing-masing pribadi seturut tuntutan agamanya.

Kedua, sekalipun negara mengikuti asas-asas yang berlaku dalam hukum negara modern, negara tidak melarang keterlibatan kelompok-kelompok agama dalam konstelasi politik di ruang publik. Adanya interdependensi antara negara dan agama, dengan tuntutan bahwa bahasa yang berlaku sesuai dengan tuntutan ranah publik, yaitu nalar publik. *Ketiga*, negara tetap bersikap netral sekalipun tidak membendung alasan-alasan religius. Negara hukum menuntut sikap agnostik negara terhadap konsep-konsep keselamatan yang terdapat dalam agama-agama.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia dapat digolongkan sebagai negara sekular karena secara konstitusional ada pemisahan otoritas antara urusan agama dan urusan negara. Hal tersebut juga nampak dalam kesepakatan untuk menghapus ‘tujuh kata’ dalam sila pertama Pancasila.

Bila postsekularisme dipahami sebagai proses belajar bersama dan komplementer antara yang sekular dengan yang religius, maka dua makna sekularisme yang dapat disimpulkan, yang menjadi titik tolak menjelaskan ide postsekularisme. *Pertama*, yang sekular perlu terbuka dan menyadari kelemahannya, dengannya berani untuk belajar dari kekayaan yang terkandung dalam agama atau kepercayaan. *Kedua*, yang religius perlu terbuka dan menyadari kelemahannya, dengannya berani untuk belajar dari yang sekular agar nilai-nilainya itu dapat berguna bagi moralitas dan etika bangsa.

Posisi Indonesia dapat dikategorikan dalam pengertian yang kedua, di mana kondisi yang menyebabkan munculnya postsekularisme adalah kurangnya

keterbukaan agama untuk belajar dari yang sekular. Kaum beragama masih kurang berani untuk belajar dari sekularitas, demi pengembangan dirinya agar semakin profetis dan transformatif. Meskipun demikian, Indonesia tidak serta merta dapat digolongkan sebagai negara sekular karena negara tidak menempatkan agama pada ranah privat. Keadaan ini juga tidak menempatkan Indonesia sebagai negara agama, karena negara tidak menjadi salah satu agama sebagai sumber utama penyelenggaraan negara. Indonesia adalah negara Pancasila yang menampung sekaligus mengatasi keduanya. Atau dalam bahasa Driyakara, Indonesia bukan negara sekular pun bukan negara agama.

Pancasila sebagai hasil kohesi nasional dari pelbagai pluralitas pandangan agama, budaya, dan ideologi menampung di dalam dirinya kekayaan nilai yang mampu menopang kehidupan bersama. Sejak masa sidang BPUPKI yang hingga saat ini, perdebatan tentang hubungan antara agama dan negara tetap aktual. Beruntung bahwa konsepsi Dasar Negara berujung pada penetapan Pancasila. Dengan menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara, Indonesia menganut paham diferensiasi di mana melepaskan Indonesia dari kecenderungan privatisasi agama atau separatisme (pemisahan urusan agama dan negara). Paham diferensiasi berarti mengembangkan toleransi kembar yaitu keadaan di mana agama dan negara menyadari batas otoritasnya masing-masing untuk kemudian berusaha mengembangkan toleransi dan membangun kerjasama atas fungsinya masing-masing.

Pancasila menempatkan agama tidak saja sebagai agama Tuhan yang mengurus relasi vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga sebagai agama manusia yang mengurus dimensi horizontal yang menyangkut hubungan antara sesama manusia bahkan yang berbeda pandangan dengannya. Pancasila adalah hasil konsensus para bapa bangsa yang dibangun atas dasar kultur Indonesia yang menerima beragam perbedaan dan mengedepankan pola hidup yang inklusif serta menjunjung asas kekeluargaan, sehingga dapat tercapai keharmonisan kehidupan bersama. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan peluang bagi penerjemahan dan aktualisasinya agar sesuai dengan kultur Indonesia

sembari tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila melampaui relativisme dan imperialisme agama. Berarti agama tidak hanya diterima sebagai bagian penting dalam negara Indonesia, tetapi juga mengakui peran sosialnya bagi kehidupan bersama. Selain itu, negara tetap memberi batasan atas intervensi agama terhadap negara. Pancasila menerapkan pola diferensiasi *a la* Indonesia.

Atas dasar itu maka penulis mengusulkan model berteologi yang cocok di Indonesia adalah ‘Pancateologi’. Pancateologi dimaksudkan bahwa dalam berteologi agama-agama diharapkan menjadikan Pancasila sebagai landasannya. Posisinya sebagai Dasar Negara yang diterima oleh semua elemen masyarakat membuka peluang bagi proses belajar bersama dan komplementer dalam perbedaan dan meminimalisir benturan teologis dan perbedaan. Menjadikan Pancasila sebagai dasar tidak terlepas dari kemampuannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Pancasila sekalipun tidak menjamin integrasi total tetapi minimal mampu mencegah disintegrasi total. Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar proses penalaran publik, karena memuat di dalam dirinya rambu-rambu bagi yang sekular dan yang religius dalam proses belajar bersama. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan hendaknya dijadikan dasar dalam proses penalaran publik ketika berteologi.

Hal ini tidak berarti Pancasila ditempatkan sebagai ‘agama’ atau kepercayaan para penganutnya, atau ‘Tuhan’ yang diyakini dalam agama-agama atau ‘Wujud Tertinggi’ dalam berbagai kepercayaan masyarakat. Akan tetapi menjadikan Pancasila sebagai dasar berteologi bagi agama-agama. Pancateologi lahir dari kenyataan pluralitas model berteologi di Indonesia yang berpotensi mengkotak-kotakkan masyarakat berdasarkan iman atau kepercayaan. Ia perlu dikuatkan dalam kalangan kaum beragama agar toleransi dan kerukunan antarumat beragama dapat tetap terjaga serta terjalin secara harmonis.

Pancateologi bertitik tolak dari pemahaman akan posisi Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara Indonesia. Sebagai ideologi Pancasila bersifat integralistik karena mengatasi partikularitas paham baik perseorangan maupun golongan. Pancasila tidak menolak partikularitas ideologi perseorangan

atau golongan sejauh berada dalam wilayah privat (keluarga) dan komunitas (etnis, agama, dan golongan masyarakat) masing-masing. Akan tetapi dalam wilayah publik kenegaraan, Pancasila dijadikan sebagai titik temu antara paham perseorangan dan golongan tersebut.

Pancateologi melampaui konsepsi rasionalisme dan fideisme. Dalam kerangka pancateologi, warga beragama dituntut untuk menggunakan akal budi dalam kehidupan keagamaan tanpa terjebak dalam rasionalisme dan dituntut untuk mengembangkan kehidupan keagamaan tanpa terjebak dalam fideisme. Hal ini berarti warga negara dapat menjalankan kehidupan keagamaan tanpa menyangkal rasionalitasnya dan dapat menggunakan akal budinya tanpa menyangkal keimanannya. Pancasila dicetus dengan belandaskan pada kultur bangsa Indonesia yang inklusif, mengedepankan aspek kekeluargaan, dan mengedepankan harmoni. Untuk itu bila Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam berteologi minimal teologi yang dikembangkan tidak bertentang dengan kultur bangsa Indonesia, berarti bersifat kontekstual. Hal ini juga berarti agama dapat memainkan peran sosialnya yang emansipatif dan transformatif serta mendukung kemanusiaan.

Pancateologi mendorong penggunaan Pancasila sebagai dasar berteologi. *Sila pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketuhanan dalam kerangka Pancasila mengandung makna bahwa negara mengakui keberadaan agama dan perannya publiknya. Namun, negara tetap menjaga posisi netralnya agar bebas dari dominasi agama. Selain itu warga beragama dituntut untuk mampu mengembangkan kehidupan keagamaannya secara beradab dan saling menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, tuntutananya ialah bahwa dalam menjalankan tugas keagamaannya warga beragama tidak boleh mengabaikan tugasnya untuk meluhurkan kemanusiaan. Berkaitan dengan pluralitas sumber pandangan hidup yang tidak saja dimiliki oleh kaum beragama, sila ketuhanan tidak berarti mendiskreditkan kaum non agama. Karena sila ketuhanan disini diposisikan sebagai kategori etis, yang memuat di dalam dirinya landasan moral dalam relasi antarsesama manusia.

Untuk itu dalam negara demokratis yang pluralistik sila pertama hendaknya ditafsir sebagai kategori etis. Sebagai kategori etis berarti penekanannya lebih sebagai moralitas publik. Sebagai moralitas publik, Pancasila memungkinkan seorang atheis untuk hidup di Indonesia akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari diwajibkan untuk menghormati nilai ketuhanan-keagamaan dan tidak menyebarkan propaganda untuk menolak dan membenci agama. Bagi agama dan kepercayaan sendiri, teologi memiliki dua tugas rangkap. Tugas rangkap teologi yaitu di satu sisi menemukan cara berpikir yang relevan dan memenuhi standar refleksi rasio modern dan di sisi lain tetap memiliki kategori-kategori yang memadai guna mengungkapkan kekayaan isi wahyu.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila Kemanusiaan mengandung makna bahwa setiap warga beragama wajib untuk mengamalkan ajaran agamanya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sila kemanusiaan mengandung unsur internasionalisme dan nasionalisme. Internasionalisme berarti, kemanusiaan yang diperjuangkannya oleh Indonesia melampaui batas teritorial atau kenegaraan. Sedangkan nasionalisme berarti perjuangan kemanusiaan yang bersifat internasional harus terlebih dahulu mendapat dasar yang kuat dalam bangsa Indonesia. Perjuangan kemanusiaan baru berefek internasional ketika secara nasional perjuangan tersebut sungguh-sungguh nampak nyata di negara Indonesia.

Sila kemanusiaan dengannya menuntut agar manusia dipandang secara autentik bahwasanya manusia adalah pribadi yang mulia. Untuk itu tidak bisa dimanipulasi dan diinstrumentalisasi demi kepentingan apapun. Selain itu, karena dijiwai oleh sila ketuhanan, sila ini menerangkan bahwa realitas hidup manusia tidak hanya sebatas pada sesuatu yang dapat diinderai. Ada dimensi batiniah manusia yang membuka ruang dalam dirinya untuk mengalami situasi-situasi yang bahkan melampaui pemahaman rasionalnya. Pengalaman yang menguatkan dimensi suara hatinya. Dimensi suara hati inilah yang menjadi dasar kebebasan manusia. Untuk itu kebebasan berpikir dan kebebasan beragama harus dipahami sebagai bagian penting dalam proses realisasi kebebasan suara hati.

Sila kemanusiaan menegaskan bahwa Pancasila memberi peluang bagi iman dan akal budi (ilmu pengetahuan) untuk bekerjasama meluhurkan kemanusiaan. Perjuangan meluhurkan kemanusiaan tersebut mengandaikan penghormatan yang setara antara hak-hak masing-masing pribadi dan masing-masing kelompok. Dengan bertitik tolak dari unsur kemanusiaan, yang sekular dan yang religius dapat menjadi pengawas satu sama lain, agar pelaksanaan dan perkembangannya tidak menyalahi kemanusiaan. Bagi kaum beragama ada tuntutan kesalehan sosial, yaitu ruang humanitas yang bisa ditoleransikan dan sekaligus dikerjasamakan.

Dalam kerangka sila kemanusiaan ini, proses belajar bersama antara yang sekular dan yang religius harus mengutamakan martabat manusia. Penggunaan akal budi dalam kehidupan beragama, mencegah terjadinya radikalisme bahkan teroris yang berjuang dengan berusaha melenyapkan perbedaan. Tindakan yang bertentangan dengan hak dasariah manusia yaitu hak hidupnya. Selain itu agama hadir sebagai upaya untuk menyelamatkan kemanusiaan, ketika modernitas melenceng dari jalur yang seharusnya. Dengannya perkembangan ilmu pengetahuan dan industri tidak mengeksploitasi manusia dan alam.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila persatuan dalam kerangka Pancasila mengandung makna pengakuan dan penerimaan atas beragam suku, bahasa, agama, budaya, dan ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi seperti Indonesia tentunya senantiasa dibayang-bayangi oleh perseteruan dan perselisihan antara beragam paham yang berbeda tersebut. Untuk itu sila persatuan hendak merangkul pluralitas tersebut sebagai kekuatan dalam membangun Indonesia Merdeka. Semboyan *bhineka tunggal ika* menjadi gambaran atas makna persatuan dalam perbedaan tersebut. Visi persatuan yang diupayakan agar keberagaman yang ada mampu bekerjasama secara inklusif dan harmonis dalam membangun Indonesia yang lebih baik lagi.

Prinsip persatuan mendorong dan menekankan bahwa yang berlaku dalam ruang publik adalah hal-hal atau nilai-nilai yang dapat berlaku secara umum. Hal

ini berarti nilai-nilai partikular yang hendak ditampilkan secara publik tidak berpretensi memecahbelah persatuan.

Pancasila menghendaki agar nilai-nilai sekular dan nilai-nilai religius yang berperan di ruang publik mendukung terciptanya persatuan. Di mana, para warga hendaknya menghayati hak-haknya dalam komunikasi dan partisipasi secara aktif, yang berarti tidak hanya demi kepentingan sendiri, tetapi selalu juga berorientasi pada kepentingan umum. Karena kunci pokok persatuan Indonesia terletak pada adanya negara persatuan yang menampung tujuan politik bersama yang mengatasi segala paham perseorangan dan golongan walaupun faktor budaya juga memiliki peran penting.

Setiap kaum beragama diharapkan agar mampu mengembangkan rasa persatuan dengan tidak membedakan antara keagamaan dan nasionalisme. Bahkan lebih daripada itu umat beragama di Indonesia diharapkan agar mampu mempertautkan etika universal dalam agama-agama dan Pancasila. Agama dipanggil untuk mengedepankan nilai ajaran intinya, membumikanya dengan budaya lokal, memanusiakan manusia dengan mengembangkan sikap saling toleran antarsesama. Dengan demikian, tuntutannya adalah mengedepankan rasa nasionalisme. Pluralisme agama bukan semata-mata terletak pada pengakuan akan keberagaman perbedaan tradisi agama serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tetapi lebih merupakan perjanjian positif dan usaha yang dilakukan secara aktif untuk memahami perbedaan dan persamaan secara terbuka melalui dialog yang konstruktif. Wawasan dan rasa nasionalisme itu mendorong setiap warga negara untuk memberikan penguatan terhadap negara berdasarkan nilai-nilai perseorangan atau golongan dan negara memberikan penguatan terhadap nilai-nilai perseorangan atau golongan.

Sila persatuan menegaskan bahwa Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sangat terfragmentaris oleh perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan identitas-identitas lokal. Pancasila dapat berperan untuk mengatasi paham-paham yang berpotensi menciptakan kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menampilkan wajah yang kompromistik, sintetis,

pencampuran segala aspek budaya, serta kombinasi yang harmonis dan estetis, di mana mengedepankan kehidupan publik yang lebih partisipatif dan nondiskriminatif.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat-Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Ada tiga makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, kerakyatan. Kedua, dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan. Ketiga, dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila kerakyatan mengandung visi bahwa rakyat merupakan subjek utama dalam penyelenggaraan negara, yang berarti bahwa segala bentuk kebijakan dan peraturan yang menyangkut kepentingan rakyat secara umum tidak boleh mendiskriminasi atau mengorbankan rakyat yang lainnya. Semuanya harus bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk itu maka dalam upaya menciptakan keadilan sosial rakyat harus dilibatkan dalam proses deliberasi yang diwakili oleh DPR yang dipilih.

Pancasila harus dilihat sebagai hasil proses belajar (secara demokratis) para pendiri bangsa. Pancasila memberikan gambaran akan keterbatasan pendirian atau konsep negara agama atau negara sekular. Pancasila mengadopsi nilai-nilai penting dari dua model negara tersebut, sembari membangun negara yang sesuai dengan sejarah dan kultur bangsa Indonesia. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, kekuatan utama terletak pada rakyat, di mana terdapat kebebasan politik untuk melaksanakan musyawarah-mufakat. Proses pengambilan keputusan tidak berdasarkan pada dikte suara mayoritas atau kelompok kecil oligarki, tetapi berdasarkan pada model kepemimpinan yang mengedepankan hikmat/kebijaksanaan yang menggunakan rasionalitas deliberatif dan kearifan lokal tanpa membeda-bedakan. Demokrasi Indonesia harus menunjang terwujudnya lima sila pancasila baik secara yuridis-institusional maupun dalam praktek kehidupan politik praktis. Hal itu berarti, kalau negara demokratis hendak legitim maka harus menjalankan deliberasi publik, yang melibatkan berbagai pihak termasuk kelompok-kelompok agama.

Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini menjadi tujuan dari keempat sila lainnya. Sila keadilan menjadi sebab dan tujuan dalam penyelenggaraan negara. Sebagai sebab, keadilan sosial hendaknya dijadikan sebagai landasan dalam penetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sebagai tujuan, keadilan sosial hendaknya menjadi tujuan penyelenggaraan negara. Keadilan sosial tersebut mencakup bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Visi keadilan memuat upaya mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia secara badaniah dan rohaniah entah secara individu atau secara sosial. Keseimbangan itu mencakup pula pemenuhan hak sipil dan politik, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Keadilan yang hendak dicapai tidak saja berkaitan dengan hak politis tetapi juga hak ekonomis. Sinergitas antara demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi diharapkan dapat mengembangkan dan mengintegrasikan kebijakan politik dan kebijakan sosial yang berorientasi pada kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan dalam semangat kekeluargaan tanpa mengorbankan hak milik dan usaha swasta. Dengannya keadilan sosial yang diperjuangkan melalui penguatan kekuatan rakyat tidak mencederai jalannya pasar.

Tuntutan dan tanggungjawab menciptakan keadilan sosial merupakan tugas setiap anggota masyarakat. Agar tujuan keadilan tersebut dapat tercapai, negara dengan menggunakan ideologi sekular tidak bisa berjalan sendiri. Negara tetap membutuhkan kehadiran agama untuk mendampingi agar tidak menderai kemanusiaan. Perpaduan antara kelima sila Pancasila membuka ruang kerjasama antara paham religius dan paham sekular.

Sekalipun kelima sila Pancasila memiliki maknanya masing-masing, tetapi tidak boleh dipahami secara terpisah antara satu sila dengan sila lainnya karena merupakan satu kesatuan dan saling kait-mengait satu sama lain. Pancateologi dapat dipahami dalam posisinya sebagai teologi kontekstual, karena berasal dari konteks bangsa Indonesia sebagai negara plural yang demokratis. Pancateologi dapat dilihat sebagai bentuk teologi pembebasan karena bertujuan untuk membebaskan kaum beragama dari pola keagamaan yang cenderung mengabaikan

aspek keadaban dan kemanusiaan dalam beragama. Dengan demikian, Pancateologi berarti proses belajar bersama antara agama dan negara, di mana ada upaya kerjasama menciptakan keadilan sosial tanpa mengabaikan otoritasnya masing-masing. Peran Pancateologi di Indonesia membentuk karakter keimanan tanpa mengabaikan karakter kebangsaan.

Model teologi yang didapat dikembangkan di Indonesia dengan menggunakan Pancateologi sebagai metode berteologi adalah model transendental. Sentralitas model teologi ini terletak pada subjek atau pribadi manusia dalam aktus mengetahui. Berarti mendorong warga beragama agar berkembang menjadi subjek 'yang sejati', yang memungkinkannya mencapai pengetahuan yang objektif dan pengalaman yang riil, karena menuntut penggunaan akal budi dalam menghidupi imannya.

Kekuatan subjektivitas terletak pada tuntutan pada kesejatian seseorang sebagai orang beriman yang hidup dalam konteks budaya dan sejarah yang khas. Pancateologi berarti mendorong seorang pribadi yang beriman agar mampu mengembangkan pengetahuan imannya secara autentik dan pada saat yang sama mengharuskannya untuk mengkonfrontasikan pengetahuan imannya dengan konteks situasi dan kebudayaan Indonesia yang plural. Keadaan ini tidak lain berarti konteks seseorang, yang dilengkapi dengan pengalaman pribadinya, budayanya, dan lokasi sosialnya, adalah tempat baginya untuk mengalami kehadiran Allah. Dengan pengungkapan pengalaman iman tersebut, seseorang membantu orang lain untuk menemukan kesejatian dirinya entah sebagai subjek beriman atau subjek budaya. Menjadi manusia berarti pengalaman transendensinya (sesuatu yang melampaui) mendorongnya menuju pemahaman dan kebenaran, mendorong tingkah laku etis, dan menuju pada kebebasan dirinya sebagai gambaran diri Allah.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Bagi Pemerintah

Suatu negara yang berdaulat haruslah memiliki kekuatan dasar yang mampu menopang agar negara tetap ada. Negara sebagai milik bersama masyarakat harus mengembangkan sikap mengayomi semua elemen, mengakomodasi semua agama dan golongan. Indonesia sebagai negara plural menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara agar mampu menaungi semua perbedaan yang ada. Penguatan atas Pancasila bertujuan agar tercapai persatuan tanpa mengabaikan perbedaan-perbedaan identitas perseorangan dan kelompok. Dengan demikian, masyarakat menghidupi kenangan kultur Indonesia, sembari membangun kehidupan guna mencapai harapan bersama tentang Indonesia yang lebih baik.

5.2.2 Bagi Warga Beragama

Sebagai bagian dari negara demokrasi yang memberi ruang bagi berbagai bentuk ekspresi diri dan kelompok termasuk berteologi, tentunya ada kecenderungan warga beragama untuk menjadikan kebenaran imannya sebagai landasan kebijakan publik. Akan tetapi konteks Indonesia sebagai negara dengan pluralitas agama dan kepercayaan, tentunya berpotensi menyebabkan benturan antara kebenaran-kebenaran iman. Untuk itu dituntut bentuk keimanan yang tidak saja mengembangkan aspek iman tetapi juga aspek akal budi melalui proses penalaran publik. Hal tersebut dapat dimungkinkan dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan dalam berteologi (Pancateologi). Dengan demikian agama tetap memainkan peran sosialnya sebagai landasan moral yang mendukung daya emansipatif dan transformatif, karena iman dan akal budi didayagunakan secara seimbang. Berteologi berdasarkan Pancasila berarti mengembangkan iman tanpa mengabaikan daya akal budi dan dapat mengembangkan akal budi tanpa mengabaikan daya iman.

DAFTAR PUSTAKA

KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bruce, Steve dan Steven Yearley. *The Sage Dictionary of Sociology*. London: Sage Publications, 2006.
- Heuken, A.. *Ensiklopedi Gereja* (entri Agama). Cet. I. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2004.
- Lacoste, Jean Yves. *Encyclopedia of Christian Theology*. New York: Routledge, 2005.

DOKUMEN GEREJA

- Paus Fransiskus, *Ensiklik Fratelli Tutti*. Terj. Martin Harun. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2021.

BUKU-BUKU

- A'la, Abd. *Agama Tanpa Penganut*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Adams, Daniel J.. *Teologi Lintas Budaya. Refleksi Barat di Asia*. Terj. Dachlan Sutisno dan K.G. Hamakonda. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993.
- Al-Azhary, Usamah Sayyid. *Islam Radikal: Telaah Kritis Radikalisme dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS*. Terj. M. Hidayatullah. Abu Dhabi: Dar al-Faqih, 2015.
- Arif, Syaiful. *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Armstrong, Karen. *Sejarah Tuhan*. Terj. Zaimul Am. Bandung: Mizan, 2018.
- Asad, Talal. *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford, California: Stanford University Press, 2003.
- Baghi, Felix. *Alteritas: Pengakuan, Hospitalitas, persahabatan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- (ed.). *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- *Predeskripsi dan Ironi, Mengola Cita Rasa Kemanusiaan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- Bagir, Haidar. *Islam Tuhan, Islam Manusia, Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau*. Bandung: Penerbit Mizan, 2017.

- Barbieri Jr., William A.. ed., *At the Limits of the Secular: Reflection on Faith and Public Life*. Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 2014.
- Bengtson, Josef. *Explorating in Post-Secular Metaphysics*. New York: Palgrave Macmillan, 2015.
- Berger, Peter L.. *Kabar Angin Dari Langit: Makna Teologis dalam Masyarakat Modern*. Terj. J.B. Sudarmanto. Jakarta: LP3ES, 1991.
- *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Terj. Hartono. Jakarta: LP3ES, 1991.
- *The Sacred Canopy. Elements of Sociological Theory of Religion*. New York: Open Road Media, 2011.
- Bevans, Stephen B.. *Teologi dalam Perspektif Global*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- dan Roger P. Schroeder. *Terus Berubah-Tetap Setia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.
- Bhaghi, Silvano Keo. *Negara Bukan-bukan?*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Bo'a, Fais Yonas dan Sri Handayani RW. *Memahami Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2019.
- Bruce, Steve. *Religion in the Modern World: From Cathedrals to Cults*. New York: Oxford University Press, 1996.
- *Secularization, In Defence of an Unfashionable Theory*. New York: Oxford University Press, 2011.
- Calne, Donald B.. *Batas Nalar, Rasionalitas dan Perilaku Manusia*. Cet. IV. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018.
- Ceunfin, Frans (ed.). *Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Jil. 1. Maumere: Penerbit Penerbit Ledalero, 2007.
- Copson, Andrew. *Secularism, A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2019.
- Cox, Hervey. *The Secular City, Secularization and Urbanization in Theological Perspective*. USA: Princeton University Press, 2013.
- Darmidiharjo, Dardji. *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*. Jakarta: Aries Lima, 1984.
- Denny J.A.. *Rumah Bersama Kita Bernama Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Cera Budaya Indonesia, 2018.
- Dewantara, Agustinus W.. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017.
- Dja'far, Alamsyah M.. *[In]Toleransi! Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

- Dobbelaere, Karel. *Secularization: An Analysis at Three Levels*. Brussels: Presses Interuniversitaires Europeennes-Peter Lang, 2002.
- Donohue, J dan John L. Esposito (eds.). *Islam dan Pembaharuan, Esiklopedi Masalah-masalah*. Terj. Machnun Husein. Jakarta Utara: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik di Indonesia*. Edisi Digital. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Fachrudin, Aziz Anwar. *Polemik Tafsir Pancasila*. Yogyakarta: CRCS (*center for Religious and Cross-cultural Studies*) Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gajah Mada, 2018.
- Habermas, Jurgen. *Between Naturalism and Religion*. Terj. Ciara Cronin. Cambridge: Polity Press, 2008.
- Hamilton, Malcolm. *The Sociology Of Religion, Theoretical and Comparative Perspectives*. New York: Routledge, 2001.
- Hao, Yap Kim. *Doing Theology in a Pluralistic World*. Tanpa tempat terbit. Tanpa tahun.
- Harari, Yuval Noah. *21 Pelajaran Untuk Abad ke-21*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- Hardiman, F. Budi. *Melampaui Postivisme dan Modernitas*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2003.
- *Humanisem dan Sesudahnya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- *Seni Memahami*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari “Bangsa Setan-setan”, Radikalisme Agama sampai Post-Sekularisme*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2018.
- Haryanto, Sindung. *Sosiologi Agama, dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2015.
- Haryatmoko. *Dominasi Penuh Muslihat Anti Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2016.
- Hatta, Mohammad, dkk.. *Uraian Pancasila*. Cet. II. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1984.
- *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara, 1966.
- Hill, Brennan R., Paul Knitter dan William Madges, *Faith, Religion, and Theology, a Contemporary Introduction*. Mystic: Twenty-Third publications, 1990.

- Huntington, Samuel P.. *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Terj. M. Sadat Ismail. Jakarta: Penerbit Qalam, 2012.
- Hutahaean, Wendy Sepmady. *Teologi Agama-agama*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Intan, Benyamin Fleming. *“Publik Religion” and the Pancasila-Based State of Indonesia*. New York: Peter Lang Publishing, Inc., 2006.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2002.
- Kartono dan Susi Dyah Fatmawati. *Proses Perumusan Pancasila*. Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2019.
- Kebung, Konrad. *Filsafat Berpikir Orang Timur*. Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka, 2011.
- Latif, Muhaemin. *Perkembangan Teologi Modern*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cet. VII. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- *Reaktualisasi Pancasila*. Tanpa tahun, tanpa penerbit.
- Ledewitz, Bruce. *Hallowed Secularism: Theory, Belief, Practice*. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
- Madung, Otto Gusti. *Negara, Agama, dan Hak-hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- *Post-sekularisme, Toleransi, dan Demokrasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Magnis-Suseno, Frans. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
- *Filsafat Kebudayaan Politik. Butir-butir Pemikiran Kritis*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan persaudaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- *Etika Abad Kedua Puluh, 12 Teks Kunci*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- *Menalar Tuhan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- *Demokrasi, Agama, Pancasila. Catatan Sekitar Perpolitikan Indonesia Now*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2021.

- Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies, Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Menoh, Gusti A. B.. *Agama dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Nafi', M. Zidni. *Menjadi Islam, Menjadi Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Nafis, Cholil. *Piagam Madinah dan Deklarasi HAM, Studi Historis dan Konseptual Atas Nilai Pluralisme Beragama*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2015.
- Norris, Pippa dan Ronald Inglehard. *Sekularisasi Ditinjau Kembali, Agama dan Politik di Dunia Dewasa Ini*. Terj. Zaim Rofiqi. Tangerang: Pustaka Alvabet dan Yayasan Wakaf Paramadina, 2009.
- Nottingham, Elizabeth K.. *Agama dan Masyarakat*. Terj. Abdul Muis Naharong. Jakarta Utara: Penerbit CV Rajawali, 1996.
- O'dea, Thomas F.. *Sosiologi Agama, Suatu Pengantar Awal*. Terj. Tim Penerjemah YASOGAMA. Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Pardoyo. *Sekularisasi dalam Polemik*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.
- Raho, Bernardus. *Sosiologi Agama*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Smith, Graeme. *A History of Secularism*. London: I. B. Tauris, 2008.
- Snijders, Adelbert. *Manusia, Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004.
- St. Sularto dan D. Rini Yunarti. *Konflik Di Balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Sulasmono, Bambang Suteng. *Dasar Negara Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Suwarno, P.J.. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Syam, Nur. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Tan, Petrus. *Agama Minus Nalar*. Meumere: Penerbit Ledalero, 2020.
- Wahid, KH. Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Yusran R. (ed.). *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001.

ARTIKEL DALAM BUKU

- Anggraini, Reni Dian. “Analisis Konsep Sekularisasi Ditinjau dari Perspektif Nucholish Madjid”, dalam Mochamad Ziaul Haq dan MT. Rahman ,eds.. *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- Anwar, M. Syafi’i. “Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Membingkai Potret Pemikiran Politik KH Abdurrahma Wahid”, dalam Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Arivia, Gadis. “Pancasila dan HAM di Era Pluralisme”, dalam Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila. *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Depok: Kampus Fisip Universitas Indonesia, 20016.
- Bagir, Zainal Abidin dan AA GN Ari Dwipayana. “Keragaman, Kesetaraan dan Keadilan: Pluralisme Kewargaan dalam Masyarakat Demokratis”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk.. *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2011.
- “Pluralisme Kewargaan: Dari Teologi ke Politik”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk.. *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2011.
- Bala, Kristoforus. “Menggunakan Korelasi Mutual Kritis dalam Berteologi Kontekstual di Indonesia”, dalam Robert Pius Manik, Gregorius Pasi, dan Yustinus, eds.. *Berteologi Baru untuk Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.
- Baumgartner, Christoph. “Re-examining an Ethics fo Citizenship in Postsecular Societies”,dalam Rosi Braidotti, dkk., eds.. *Transformations of Religion and the Public Sphere, Postsecular Publics*. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Berger, Peter L.. “The Deseccularization of the World: A Global Overview”. Dalam Michaela Pfadenhauer. *The New Sociologi of Knowledge: The Life and Work of Peter L. Berger, With Selected essays by Peter L. Berger*. Translated by Miriam Geoghegan. New Brunswick and London: Transaction Publishers, 2013.
- Bhargava, Rajeev. “Rehabilitating Secularism”, dalam Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen, eds.. *Rethinking Secularism*. New York: Oxford University Press, Inc., 2011.
- Binawan, Al. Andang L.. “Agenda yang Masih Tersisa dari Kebebasan Beragama”, dalam F. Wawan Setyadi, ed.. *Meluhurkan Kemanusiaan, Kumpulan Esai untuk A. Sudiarja*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018.

- Calhoun, Craig. "Secularism, Citizenship, and the Public Sphere", dalam Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen, eds.. *Rethinking Secularism*. New York: Oxford University Press, Inc., 2011.
-, Mark Juergensmeyer, and Jonathan Vanantwerpen. "Introduktion", dalam Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen, eds.. *Rethinking Secularism*. New York: Oxford University Press, Inc., 2011.
-, Eduardo Mendieta dan Jonathan VanAntwerpen. "Introduction", dalam Craig Calhoun, Eduardo Mendieta dan Jonathan VanAntwerpen, eds.. *Habermas and Religion*. Cambridge: Polity Press, 2013.
- Casanova, Jose. "Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective", dalam The Hedgehog Review. *After Secularization*. Charlottesville: Institute for Advanced Studies in Culture, University of Virginia, 2006.
- "The Secular, Secularization, Secularism", dalam Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen, eds.. *Rethinking Secularism*. New York: Oxford University Press, Inc., 2011.
- "Exploring the Postsecular: Three Meaning of 'The Secular' and Their Possible Transcendence", dalam Craig Calhoun, Eduardo Mendieta dan Jonathan VanAntwerpen, eds.. *Habermas and Religion*. Cambridge: Polity Press, 2013.
- Daven, Mathias. "Prolog", dalam Silvano Keo Bhaghi. *Negara Bukan-bukan?*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- "Politik Atas Nama Allah", dalam Mathias Daven dan Georg Kirchberger, eds.. *Hidup: Sebuah Pertanyaan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Dewantara, Agustinus Wisnu. "Menggagas Teologi Khas Indonesia dalam Bingkai Filsafat Pancasila", dalam Robert Pius Manik, Gregorius Pasi, dan Yustinus, eds.. *Berteologi Baru untuk Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.
- Habermas, Jurgen. "Basis Prapolitis Sebuah Negara Hukum Yang Demokratis", dalam Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko, eds.. *Dialektika Sekularisasi, Diskusi Habermas - Ratzinger dan Tanggapan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Hamdi, Ahmad Zainal dan Muktafi. "PENDAHULUAN: Intoleransi, Ujaran Kebencian, Hingga Dialog Antariman", dalam Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, eds.. *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Daular Press, 2017.
- Hardiman, F. Budi. "Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas", dalam F. Budi Hardiman, ed.. *Ruang Publik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.

- “Ruang Publik dan Demokrasi Deliberatif, Etika Politik Jürgen Habermas”, dalam F. Budi Hardiman, dkk.. *Empat Esai Etika Politik*. Jakarta: WWW.srimulyani.net, 2011.
- Kelen, Donatus Sermada. “Agama dalam Ruang Publik di Indonesia dan Posisi Gereja Katolik -Satu Telaah Filsafat Sosial”, dalam Dr. Alphonsus Tjatur Raharso, Dr. Paulinus Yan Olla dan Dr. Yustinus, eds.. *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan, Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural*. Seri Filsafat Teologi Widya Sasana, Vol. 27, No. 26, 2017.
- Kleden, Paul Budi dan Adrianus Sunarko (eds.). “Pengantar Editor”, dalam Paulus Budi Kleden dan Adrianus Sunarko, eds.. *Dialektika Sekularisasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- “Ratzinger tentang Tema Politik”, dalam Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko, eds.. *Dialektika Sekularisasi, Diskusi Habermas - Ratzinger dan Tanggapan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Kristianto, A. Eddy. “Teologi Sosio-Antropologis dalam Perspektif Antariman”, dalam Robert Pius Manik, Gregorius Pasi, dan Yustinus, eds.. *Berteologi Baru untuk Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.
- Laegaard, Sune. “Inclusion or Exclusion of Religion: What Does Secularism Require?”, dalam Jonathan Seglow and Andrew Shorten, eds.. *Religion and Political Theory: Secularism, Accommodation and The New Challenges of Religious Diversity*. London: Rowman and Littlefield International, Ltd., 2019.
- Laku, Sylvester Kanisius. “Pendahuluan”, dalam Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.
- Lanur, Alex. “Pancasila – Paham Kebangsaan dan Integritas Nasional”, dalam Alex Lanur, ed.. *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Problematika dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Maarif, Ahmad Syafii. “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia”, dalam Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta Selatan: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSUAD) Yayasan Wakaf Paramadina, 2010.
- Madjid, Nurcholish. “Iman dan Kemajemukan Masyarakat: Antarumat”, dalam Budhya Munawar-Rachman, ed.. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society, 2019.
- “Iman yang Dinamis”, dalam Budhya Munawar-Rachman, ed.. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society, 2019.

-“Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”, dalam Budhya Munawar-Rachman, ed.. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society, 2019.
- “Klaim Kebenaran”, dalam Budhya Munawar-Rachman, ed.. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society, 2019.
- “Masalah Pembaruan Pemikiran dalam Islam”, dalam Budhya Munawar-Rachman, ed.. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society, 2019.
- “Peranan Islam dalam Proses Politik di Indonesia”, dalam Budhya Munawar-Rachman, ed.. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society, 2019.
- “Pluralisme dan Toleransi”, dalam Budhya Munawar-Rachman, ed.. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society, 2019.
- “Sekali Lagi Tentang Sekularisasi”, dalam Budhya Munawar-Rachman, ed.. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society, 2019.
- “Tantangan Umat Beragama Pada Abad Modern”, dalam Budhya Munawar-Rachman, ed.. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid, 2019.
- Magnis-Suseno, Franz. “Persatuan Indonesia, Pancasila, Paham Kebangsaan dan Integrasi Nasional”, dalam Alex Lanur, ed.. *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Problematika dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- “Tambang Emas Bagi yang Ingin Mengerti Indonesia”. *Prolog*, dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- “Toleransi dan Budi Luhur”, dalam F. Wawan Setyadi, ed.. *Meluhurkan Kemanusiaan, Kumpulan Esai untuk A. Sudiarja*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018.
- McKenzie, German. *Interpreting Charles Taylor’s Social Theory on Religion And Secularization*, dalam Sophia Studies in Cross-cultural Philosophy of Tradision and Culture 20. Swiss: Springer International Publishing AG, 2017.
- Mendieta, Eduardo and Jonathan VanAntwerpen. “Introduction: The Power fo Relgion in the Public Sphere”, dalam Eduardo Mendieta and Jonathan VanAntwerpen, eds.. *The Power of Religion in the Public Sphere*. New York: Columbia University Press, 2011.
- Noning, Agustinus. “Konsep Sekularisasi dalam Pandangan Nurcholish Madjid”, dalam Mochamad Ziaul Haq dan MT. Rahman, eds.. *Pemikiran Islam*

- Nurcholish Madjid*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- Okeja, Uchenna. "Introduction", dalam Uchenna Okeja, ed.. *Religion in the Era of Postsecularism*. New York: Routledge, 2020.
- Pamungkas, Cahyo. "Intoleransi dan Radikalisme dalam Pertanyaan", dalam Cahyo Pamungkas dan Yogi Setya Pernama, eds.. *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2020.
- Prior, John Masford. "Epilog", dalam Otto Gusti Madung, *Post-sekularisme, Toleransi, dan Demokrasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Sahasrad, Herdi dan Al Chaidar. "Pengantar", dalam Herdi Sahrasad dan Al Chaidar *Fundamentalisme, Terorisme dan Radikalisme, Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Freedom Foundation dan Centre for Strategic Studies - University of Indonesia, 2017.
- Samho, Bartolomeus. "Nilai Filosofit Sila V: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", dalam Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.
- Sastrapratedja, M.. "Pengantar", dalam Peter L. Berger, *Kabar Angin Dari Langit: Makna Teologis dalam Masyarakat Modern*. Terj. J.B. Sudarmanto. Jakarta: LP3ES, 1991.
- "Pancasila dalam Perspektif Etika Politik Pasca-Tradisional menurut Franz Magnis-Suseno", dalam F. Budi Hardiman, ed.. *Franz Magnis-suseno, Sosok dan Pemikirannya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
- Shoelhi, Mohammad. "Perspektif HAM dalam Piagam Madinah dan Konteks HAM Masa Kini", dalam Mohammad Shoelhi, ed. *Demokrasi Madinah, Model Demokrasi Cara Rasulullah*. Jakarta: Penerbit Republika, 2003.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Pancasila dalam Perubahan Sosial-Politik Indonesia Modern", dalam Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila. *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Depok: Kampus Fisip Universitas Indonesia, 20016.
- Stepan, Alfred. "The Multiple Secularism of Modern Democratic and Non-Democratic Regimes", dalam Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen, eds.. *Rethinking Secularism*. New York: Oxford University Press, Inc., 2011.
- Sujoko, Albertus. ""Content" dan "Context" dalam Berteologi Baru Indonesia", dalam Robert Pius Manik, Gregorius Pasi, dan Yustinus, eds.. *Berteologi Baru untuk Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.
- Sumarwan, "Odysseus, Mitos, dan Pencerahan: Bayang-bayang Nietzsche dalam Pemikiran Horkheimer dan Adorno", dalam A. Setyo Wibowo, dkk.. *Para Pembunuh Tuhan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.

- Sunarko, Adrianus. "Dialog Teologis dengan Jurgen Habermas", dalam Paulus Budi Kleden dan Adrianus Sunarko, eds.. *Dialektika Sekularisasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- "Ruang Publik dan Agama Menurut Habermas", dalam F. Budi Hardiman, ed.. *Ruang Publik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- "Sosok Agama Modern Menurut Franz Magnis-suseno", dalam F. Budi Hardiman, ed.. *Franz Magnis-suseno, Sosok dan Pemikirannya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
- Sune Laegaard, "Inclusion or Exclusion of Religion: What Does Secularism Require?", dalam Jonathan Seglow and Andrew Shorten, eds.. *Religion and Political Theory: Secularism, Accomodation and The New Challenges of Religious Diversity*. London: Rowman and Littlefield International, Ltd., 2019.
- Ratzinger, Joseph. "Apa yang Mempertahankan Keutuhan Dunia. Dasar-dasar Moral Prapolitis Sebuah Negara Liberal", dalam Paulus Budi Kleden dan Adrianus Sunarko, eds.. *Dialektika Sekularisasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Roem, Mr. Mohammad. "Kata Pengantar", dalam H. Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta: Cv. Rajawali, 1986.
- Wibowo, A. Setyo. "Kita Para Pembunuh Tuhan", dalam A. Setyo Wibowo, dkk.. *Para Pembunuh Tuhan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Crockett, Clayton. "Post-Secularism, Secular Theology, and the Names of the Real", *Dialog: A Journal of Theolgy*. Vol. 54, No. 4, Desember 2015.
- Daven, Mathias. "Agama dan Politik - Hubungan yang Ambivalen Dialog Versus "Benturan Peradaban", *Jurnal Ledalero*. Vol. 12, No. 2, Desember 2013.
- "Memahami Pemikiran Ideologis dalam Islamisme Radikal", *Jurnal Ledalero*. Vol. 17, No.1, Juni 2018.
- Fakhruroji, Moch. "Privatisasi Agama: Globalisasi dan Komodifikasi Agama", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2005.
- Hayong, Bernard. "Jati Diri: Yang Nasionalis dan yang Religius dalam Bingkai Kewarganegaraan", *Jurnal Ledalero*. Vol. 12, No. 2, Desember 2013.
- Madung, Otto Gusti. "Toleransi dan Diskursus Post-Sekularisme", *Jurnal Ledalero*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016.
- Noor, Irfan. "Identitas Agama, Ruang publik dan Post-sekularisme: Perspektif Diskursus Jurgen Habermas", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 11, No. 1, Januari 2012.

- Prakosa, Heru. "Auto-theisme: Paradoks Manusia yang Mengaku Diri Ber-Tuhan", *BASIS*, No. 01-02, tahun ke-65, 2016.
- Saifullah, S.. "Renaissance dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern", *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XXII, no. 2, Juli 2014.
- Sutikno, "Islam di antara Modernisme dan Postmodernisme". Dalam *Jurnal Religio: Jurnal Studi Agama-agama*, vol. 3. No. 1, Maret 2013
- Tan, Petrus. "Post-Sekularisme, Demokrasi, dan Peran Publik Agama", *Jurnal Ledalero*, Vol. 20, No. 1, Juni 2021
- Wattimena, Rezza A. A. "Kosmpolitanisme Sebagai Jalan Keluar Atas Tegangan Abadi Antara Neokolonialisme, Radikalisme Agama, dan Multikulturalisme", *Jurnal Ledalero*. Vol. 17, No.1, Juni 2018.
- Widjaja, Paulus S., Djoko Prasetyo Adi Wibowo, dan Imanuel Geovasky. "Politik Identitas dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila di Ruang Publik", *Gemo Teologika*, Vol. 6, No. 1, April 2021.
- Wingarta, I Putu Sastra, dkk.. "Pengaruh politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Vol. 9, No. 4, Desember 2021.
- Zain, Muhammad. "Menggagas Agama Baru di Era Posmodernisme", *Ulumuna*, Volume IX Edisi 16, no. 2, Juli-Desember 2005.

SURAT KABAR DAN INTERNET

- Fatwah Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.
- Hardiman, F. Budi. "Post-Sekularisme". *Kompas*, 7 Juni 2016.
- Lubis, Todung Mulya. "Bertumbuhnya Teologi Kebencian". *Kompas*, 30 Januari 2014.
- Meuhlenbach, Marc. "The Crisis of Secularism". *Academia Letters*, Article 818, April 2021. Diakses tanggal 19 November 2023.
- Pidato Prof. Dr. B. J. Habibie pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2011, dalam Iqra Nusantara, "Pidato Habibie pada Hari Lahir Pancasila". *Youtube*. Diakses pada tanggal 23 November 2019.
- Rakhmat, Ioanes. "Sekularisasi dan Desekularisasi". Dalam FREIDENK BLOG: Sekularisasi dan Desekularisasi (ioanesrakhmat.blogspot.com). Diakses tanggal 19 November 2023.
- Stoeckl, Kristina. "Defining the Postsecular". Makalah yang dipresentasikan dalam seminar Prof. Khoruzhij di *Academy of Sciences Moscow*, pada Februari 2011. Diakses tanggal 15 November 2023.

BAHAN KULIAH DAN SKRIPSI

Daven, Mathias. “Filsafat Pancasila”. *Bahan Kuliah*. Maumere: STFK Ledalero, 2016.

Jebau, Julius Kardi Hatom. “Deradikalisasi Islam Melalui Penguatan Pancasila”. *Skripsi*. Maumere: STFK Ledalero, 2020.